

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pendidikan Inklusi

##### 1. Pengertian pendidikan Inklusi

Istilah Inklusi memiliki makna yang sangat luas. Pengertian inklusi digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun dan mengembangkan sebuah lingkungan yang semakin terbuka, mengajak masuk dan mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, karakteristik, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya.<sup>1</sup> Konsep inklusi muncul karena adanya perilaku bersifat eksklusif atau peminggiran orang-orang tertentu oleh masyarakat atau Negara yang diluar nalar kewarasan. Peminggiran dan pemarginalan orang-orang tertentu yang mengakibatkan ketidakadilan sosial memunculkan perjuangan inklusi.<sup>23</sup>

Inklusi adalah sebuah proses (*inclusion is process*).<sup>4</sup> Artinya inklusi adalah sebagai proses yang berkelanjutan secara terus menerus untuk mencari dan menemukan cara terbaik dalam keberagaman.<sup>5</sup> Ini tentang bagaimana cara hidup dengan perbedaan dan belajar dari perbedaan tersebut. Proses belajar yang dilakukan oleh individu dengan berbagai karakteristik difasilitasi dan diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai potensi yang dimiliki. Istilah inklusi mulai merambah ke dunia pendidikan juga berdasarkan kesepakatan internasional yang

---

<sup>1</sup> Martin Iryayo dkk, *Educational Partners Perception Towards Inclusive Education*, (INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. V, No.1, Januari-Juni 2018), 26

<sup>2</sup> Arif Maftuhin, *Mendefinisikan Kota Inklusif: Asal Usul, Teori dan indikator*, (Jurnal: TATALOKA Planologi UNDIP. Vol. 9, No. 2, Mei 2017), 94

<sup>3</sup> Hasan Baharudin & Robiatul Alawiyah, *Pendidikan Inklusi bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Epistemologi Islam*, (MODELING: Jurnal Program Studi PGMI, Vol. 5, No. 1, Maret 2018), 59

<sup>4</sup> Siti Hajar, *Analisis Kajian Teoritis Perbedaan, Persamaan dan Inklusi dalam Pelayanan Pendidikan Dasar Bagi Anak berkebutuhan Khusus (ABK)*, (Jurnal Ilmiah: Mitra Swara Ganesha, Vol. 4, No. 2, Juli 2017), 40

<sup>5</sup> Dieni Lailatul Zakia, *Guru Pembimbing Khusus (GPK): Pilar Pendidikan Inklusi*, (Surakarta: Prosiding Seminar Nasional Pendidikan, 21 November 2015), 110

mendorong terwujudnya sistem pendidikan inklusi yaitu *Conventional on the Right of Person with Disabilities and optional Protocol* yang disahkan pada Maret 2007. Yang mana pada pasal 24 dalam konvensi ini dijelaskan bahwa setiap Negara berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem pendidikan inklusi di setiap tingkatan pendidikan.<sup>6</sup>

Pendidikan Inklusi adalah suatu pendekatan pendidikan yang inovatif dan strategis untuk memperluas akses pendidikan bagi semua anak berkebutuhan khusus termasuk anak penyandang cacat.<sup>7891011</sup> Sedangkan menurut pendapat Kustawan dan Hermawan menjelaskan bahwa pendidikan inklusi adalah pendidikan yang menggunakan pendekatan yang berupaya mengubah sistem pendidikan dengan menghilangkan hambatan yang dapat mencegah setiap siswa untuk sepenuhnya berpartisipasi dalam pendidikan.<sup>12</sup>

Pendidikan Inklusi adalah sebuah dimensi dari pendidikan berkualitas berbasis hak yang menekankan kesetaraan dalam akses dan partisipasi, dan secara positif merespon kebutuhan belajar individu serta kompetensi seluruh anak. Pendidikan inklusif berpusat pada anak dan menempatkan tanggung jawab adaptasi

---

<sup>6</sup>Hasan Baharudin & Robiatul Alawiyah, *Pendidikan Inklusi bagi bagi Anak Berkebutuhan Khusus dalam Perspektif Epistemologi Islam*, (MODELING: Jurnal Program Studi PGMI, Vol. 5, No. 1, Maret 2018), 59

<sup>7</sup> Dieni Laylatul Zakia, *Guru Pembimbing Khusus Pilar Pendidikan Inklusi Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Surakarta : Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan* (Jurnal Bereputasi UNS & ISPI Jawa Tengah. 21 November 2015), 111

<sup>8</sup> Martin Iryayo dkk, *Educational Partners Perception Towards Inclusive Education* (INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. V, No.1, januari-Juni 2018), 27

<sup>9</sup> Indah Permata Darma & Binahayati Rusyidi, *Pelaksanaan Sekolah Inklusi Di Indonesia*, (Prosiding KS: Riset & PKM Volume. 2, No. 2), 223

<sup>10</sup> Hasan Baharudin & Siska Ana astriani, *Pendekatan Webbed Learning Pada Pembelajaran Tematik Terhadap Peserta didik Inklusif di Madrasah*, (Jurnal of Education: Al MUDARRIS, Vol. 2, Ni. 1, April 2019), 85

<sup>11</sup> Kharisul wathoni, *Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Pendidikan Islam*, (Jurnal: Ta'allum, Vol. 1, No.1, Juni,) 2013, 71

<sup>12</sup> Diah Sumarsih & Rizki Umi Nurbaeti, *The Contribution Of Teacher's Pedagogical Habitual to The Quality of Learning Services for Children With Special Needs in Inclusive Elementary School*, (Journal of Primary Education: Universitas Negeri Semarang, Vol.8, No. 3, Desember 2018), 343

pada sistem pendidikan, bukan pada masing-masing anak.<sup>13</sup> Bersama-sama sektor lain dan masyarakat yang lebih luas, ia bekerja secara aktif untuk memastikan bahwa setiap anak, apapun jenis kelamin, bahasa, kemampuan, agama, kebangsaan, atau karakteristik lain yang dimilikinya, mendapat dukungan untuk berpartisipasi secara berarti dan belajar bersama teman sebayanya, serta berkembang mewujudkan potensi mereka.

Pendidikan inklusi adalah proses yang berlangsung secara terencana dan terarah dimana ruang lingkup penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) bersama dengan teman sebaya tidak hanya berfokus pada keterbatasan saja, akan tetapi bagaimana memberikan layanan secara utuh pada pribadi manusia selain keterbatasan/ kekurangan sekaligus memaksimalkan potensi dan kelebihan yang dimiliki.<sup>14</sup> Penanganan diri Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sekaligus memperkenalkan dan mempersiapkan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan lingkungan sekitar tentang keberadaan mereka.<sup>15</sup> Semakin awal pengakuan dan penerimaan masyarakat terhadap keberadaan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) maka ABK akan lebih cepat menyesuaikan diri dan fokus utama terhadap kelebihan dibandingkan dengan kekurangan seperti tujuan pendidikan akan tercapai.

## **2. Tantangan pelaksanaan pendidikan Dasar**

Terdapat dua tantangan besar yang sedang dihadapi oleh dunia pendidikan saat ini yaitu:

---

<sup>13</sup> Yayasan sayangi Tunas Cilik, *Pendidikan inklusif: Apa, Mengapa dan Bagaimana*, (Bandung: Inclusive Community Development and School for All, 2016), 19

<sup>14</sup> Siti Hajar, *Analisis Kajian Teoritis Perbedaan, Persamaan dan Inklusi dalam Pelayanan Pendidikan Dasar Bagi Anak berkebutuhan Khusus (ABK)*, (Jurnal Ilmiah: Mitra Swara Ganesha, Vol. 4, No. 2, Juli 2017), 42

<sup>15</sup> Stella Olivia, *Pendidikan Inklusi untuk Anak-anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: CV Andi, 2017), hlm. 2

- a. Pertambahan jumlah anak yang tereklusikan (terabaikan) dari partisipasi pendidikan yang semakin banyak.<sup>16</sup> Diperkirakan ada sekitar 113 juta anak usia sekolah dasar di seluruh dunia termasuk anak disabilitas, tidak memperoleh kesempatan pendidikan dasar (*International Consultative Forum on Education for All*, 2000), 90% dari mereka hidup di negara berkembang termasuk di Indonesia. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang berhasil di data ada sekitar 1,5 juta Jiwa. Namun secara umum, PBB Memperkirakan bahwa paling sedikit ada 10 persen anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus. Di Indonesia Jumlah anak usia sekolah yaitu 5-14 tahun ada sebanyak 42,8 juta jiwa, jika mengikuti perkiraan tersebut, diperkirakan ada kurang lebih 4,2 juta anak Indonesia yang berkebutuhan khusus.<sup>17</sup> Disamping itu anak-anak yang sudah masuk sekolah dasar pun dihadapkan pada masalah drop out sebelum dapat menyelesaikan pendidikan.
- b. Secara spesifik sekolah masih belum memberi keuntungan kepada semua anak, Artinya kebutuhan belajar anak secara individual belum dapat dipenuhi.<sup>18</sup> Sekolah lebih menekankan pada pencapaian akademik dari pada mengembangkan anak sebagai individu dalam mencapai perkembangan optimal.

Untuk mengatasi dua tantangan itu maka secara internasional terjadi pergeseran paradigma pendidikan dari pendidikan yang bersifat konvensional (eksklusif) ke pendidikan yang menjangkau semua anak yang bersifat inklusif, anti diskriminatif dan menghargai keberagaman.

---

<sup>16</sup> Subdit Kurikulum Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif*, 6

<sup>17</sup> Indah Permata Dharma & Binahayati Rusyidi, *Pelaksanaan Sekolah Inklusi Di Indonesia*, (Prosiding KS: Riset & PKM, Vol. 2 No.2 018), 224.

<sup>18</sup> Ibid, 223

### 3. Paradigma pendidikan inklusi

Pendidikan inklusif dipandang sebagai sebuah proses dalam merespon kebutuhan yang beragam dari semua anak melalui peningkatan partisipasi dalam belajar, budaya dan masyarakat, dan mengurangi eksklusivitas di dalam dan dari pendidikan.<sup>19</sup> Pendidikan inklusif mencakup perubahan dan modifikasi dalam isi, pendekatan-pendekatan, struktur dan strategi yang dapat mengakomodasi kebutuhan semua anak sesuai dengan kelompok usianya. Pendidikan inklusif dalam pelaksanaannya merupakan tanggung jawab dari sistem pendidikan biasa untuk mendidik semua anak.

Pendidikan inklusif sangat peduli dalam memberikan respon tepat terhadap spektrum kebutuhan belajar yang luas baik dalam *setting* pendidikan formal maupun pendidikan non-formal.<sup>20</sup> Pendidikan inklusif adalah sebuah pendekatan yang melihat bagaimana mengubah dan mengadaptasikan sistem pendidikan agar dapat merespon keberagaman peserta didik. Tujuannya adalah agar guru dan siswa keduanya memungkinkan merasa nyaman dalam keberagaman dan melihat keragaman sebagai hal yang normal sekaligus tantangan dan pengayaan dalam lingkungan belajar. Keberagaman bukan sebagai masalah.

Upaya memperoleh pemahaman yang jelas tentang konsep pendidikan inklusif, diperlukan definisi yang jelas, disepakati dan diterima oleh banyak pihak secara internasional. Jika pendidikan inklusif didefinisikan secara sempit atau hanya didasarkan pada pandangan bahwa anak sebagai masalah, maka pendidikan inklusif akan menjadi tidak cocok. Pendidikan inklusif memandang bahwa lingkungan sebagai masalah. Semua anak memungkinkan dapat belajar dengan optimal jika dilakukan

---

<sup>19</sup> David Wijaya, *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2019), 48

<sup>20</sup> Subdit Kurikulum Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif*, 7

perubahan/penyesuaian lingkungan terhadap kebutuhan dan hambatan belajar anak.<sup>21</sup> Definisi tentang pendidikan inklusif akan terus berubah secara bertahap sebagai refleksi dari apa yang terjadi dalam praktiknya, dalam kenyataan dan bahkan harus terus berubah jika pendidikan inklusif ingin tetap memiliki respon yang bernilai nyata dalam menghadapi tantangan pendidikan dan hak asasi manusia.

Meskipun definisi tentang pendidikan inklusif itu bersifat progresif dan terus berubah, tetapi diperlukan kejelasan konsep yang terkandung di dalamnya, karena banyak orang menganggap bahwa pendidikan inklusif sebagai versi lain dari pendidikan khusus/pendidikan luar biasa (PLB). Konsep yang mendasari pendidikan inklusif sangat berbeda dengan konsep yang mendasari pendidikan khusus. Inklusi atau pendidikan inklusif bukan istilah lain dari pendidikan khusus. Konsep pendidikan inklusif mempunyai banyak kesamaan dengan konsep yang mendasari pendidikan untuk semua dan konsep tentang perbaikan sekolah.

Definisi pendidikan inklusif yang diterima oleh banyak pihak adalah definisi yang diangkat dari seminar tentang pendidikan inklusif (*Seminar on Inclusive Education Agra India*, 1998), yang diselenggarakan di Agra India, dan disetujui oleh 55 peserta dari 23 negara.<sup>22</sup> Dari hasil seminar itu pendidikan inklusif didefinisikan sebagai berikut:

- a. Lebih luas dari pada pendidikan formal, tetapi mencakup rumah, masyarakat, non-formal dan sistem informal.
- b. Menghargai bahwa semua anak dapat belajar.
- c. Memungkinkan struktur, sistem dan metodologi memenuhi kebutuhan-kebutuhan semua anak.

---

<sup>21</sup> Yayasan sayangi Tunas Cilik, *Pendidikan inklusif: Apa, Mengapa dan Bagaimana*, (Bandung: Inclusive Community Development and School for All, 2016). 21

<sup>22</sup> Subdit Kurikulum Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Rencana Induk Pengembangan Pendidikan Inklusif*, 8

- d. Mengakui dan menghargai bahwa setiap anak memiliki perbedaan dalam usia, jenis kelamin, etnik, bahasa, disabilitas, status sosial ekonomi, potensi dan kemampuan.
- e. Merupakan proses dinamis yang secara evolusi terus berkembang sejalan dengan konteks budaya.
- f. Merupakan strategi untuk memajukan dan mewujudkan masyarakat inklusif.

Definisi Yang dikutip di atas menggambarkan sebuah model pendidikan inklusif yang mendasarkan konsep-konsep tentang: anak, sistem pendidikan, keragaman dan anti diskriminasi, proses memajukan inklusi, dan konsep tentang sumber daya.

Secara terperinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Konsep tentang Anak

Pengertian konsep tentang anak meliputi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan di dalam masyarakatnya sendiri.<sup>23</sup> Semua anak dapat belajar dan siapapun dapat mengalami kesulitan dalam belajar. Semua anak membutuhkan dukungan dalam belajar. Pembelajaran berpusat dan menguntungkan semua anak,<sup>24</sup> Keberagaman diterima dan dihargai.

b. Konsep tentang Sistem Pendidikan dan Sekolah.<sup>25</sup>

Konsep tentang pendidikan dan sekolah meliputi Pendidikan haruslah lebih luas dari pada pendidikan formal di sekolah Fleksibel dan sistem pendidikan bersifat responsif.<sup>26</sup> Lingkungan pendidikan ramah terhadap anak. Sistem

---

<sup>23</sup>Dewi, N. K. (2017). Manfaat Program Pendidikan Inklusi untuk AUD. *Jurnal Pendidikan Anak*, 6(1), 12

<sup>24</sup>Rofiah, N. H. (2015). Proses Identifikasi: Mengenal Anak Kesulitan Belajar Tipe Disleksia Bagi Guru Sekolah Dasar Inklusi. *INKLUSI*, 2(1), 109

<sup>25</sup> Garry Hornby, *Inclusive Special Education, Evidence Based Practices for Children With Special Needs and Disabilities*, (Newyork: Springer Science Business Media, 2014), 3

<sup>26</sup> David Wijaya, *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2019),37-38

mengakomodasi setiap anak yang beragam dan bukan anak yang menyesuaikan dengan sistem. Kolaboratif antar mitra dan bukan kompetitif.

c. Konsep Tentang Keberagaman dan Diskriminasi.

Konsep tentang keberagaman dan diskriminasi dalam pendidikan inklusi diantaranya:<sup>27</sup> Menghilangkan diskriminasi dan pengucilan. Memandang keberagaman sebagai sumber daya, bukan sebagai masalah. Pendidikan inklusif menyiapkan siswa menjadi toleran dan menghargai perbedaan.

d. Konsep tentang Sumberdaya

Sumberdaya dalam pendidikan inklusi meliputi Memanfaatkan sumber daya lokal yang tersedia<sup>28</sup>. Mendistribusikan sumber daya yang tersedia. Memandang manusia (antara lain: anak, orang tua, guru, kelompok orang yang termarginalkan dsb) sebagai sumberdaya kunci.

Secara eksplisit pendidikan inklusif dapat didefinisikan: bahwa sekolah seharusnya mengakomodasi semua anak tanpa memperdulikan keadaan fisik, intelektual, sosial-emosi, bahasa, atau kondisi-kondisi lain, termasuk anak-anak disabilitas, anak-anak berbakat, anak-anak jalanan, anak-anak di daerah terpencil, anak-anak dari kelompok etnik dan bahasa minoritas yang tidak beruntung dan terpinggirkan dari masyarakat. Pendidikan inklusif sebenarnya pendidikan yang menghendaki perubahan dan modifikasi isi kurikulum, pendekatan, struktur dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan hambatan belajar dan kebutuhan anak. Sejalan dengan itu pendidikan inklusif ditopang oleh elemen-elemen sebagai

---

<sup>27</sup> David Wijaya, *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2019),.. 118

<sup>28</sup> David Wijaya, *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2019),. 118

berikut:<sup>29</sup> Merangkul semua anak dalam Pelaksanaan pembelajaran berpusat pada anak bukan pada kurikulum. Menghargai dan menerima perbedaan serta keberagaman pada lingkungan sekolah yang mudah dijangkau. Guru bekerja dalam tim dan Orang tua terlibat dalam pembelajaran di sekolah dengan cara kurikulum, metode pembelajaran, dan penilaian disesuaikan pada kebutuhan anak.

#### **4. Faktor-faktor yang Melatarbelakangi Munculnya Konsep Pendidikan Inklusi**

Munculnya gagasan tentang pendidikan inklusif dilatarbelakangi oleh dua faktor utama yaitu adanya gerakan yang disebut *schools improvement* dan didorong oleh pemikiran yang berkembang dalam bidang *special needs education*. Kedua faktor tersebut dalam realitasnya terjadi melalui:<sup>30</sup> Lobi-lobi yang dilakukan oleh para aktivis seperti organisasi penyandang cacat, kelompok-kelompok orang tua, dan kelompok-kelompok yang mendorong anak perempuan untuk memperoleh akses ke pendidikan. Adanya pandangan yang menganggap bahwa program sekolah khusus dan sekolah terpadu tidak berhasil. Adanya desakan yang sangat kuat terhadap sekolah agar peduli terhadap kenyataan bahwa ada sekian banyak anak yang terpinggirkan dan tidak mendapatkan akses ke pendidikan, seperti pengungsi, orang yang terinfeksi HIV/AIDS, anak-anak dari keluarga miskin, dan situasi konflik. Adanya keberhasilan program-program yang dilaksanakan oleh masyarakat dalam pemberantasan buta huruf dan keberhasilan program rehabilitasi bersumber daya masyarakat (*Community Based Rehabilitation*) dalam membantu mengembangkan para penyandang cacat. Banyaknya contoh-contoh keberhasilan dalam praktik inklusif dalam rentang budaya dan konteks sosial tertentu.

---

<sup>29</sup> Subdit Kurikulum Direktorat Pembinaan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Rencana Induk Pengembangan*, 9

<sup>30</sup> David Wijaya, *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2019) .27

## 5. Tantangan dan Peluang Pendidikan Inklusi

Tantangan dan peluang dalam mengimplementasikan pendidikan inklusi di Indonesia, khususnya di Tingkat Nasional dihadapkan pada tantangan yang tidak mudah. Secara garis besar tantangan itu biasa dikategorikan kedalam tiga kelompok besar yaitu tantangan yang bersifat budaya, kebijakan dan tantangan dalam praktik pendidikan inklusi.<sup>31</sup>

### 1) Tantangan yang Bersifat Budaya

Akar budaya bangsa Indonesia sejatinya adalah budaya inklusif. Hal ini bisa dibuktikan bahwa Negara Republik Indonesia didirikan di atas landasan falsafah Bhineka Tunggal Ika, yang sangat menghargai perbedaan dan keberagaman.<sup>32</sup> Oleh karena itu para pendiri Negara ini sangat menyadari bahwa masyarakat Indonesia sangat heterogen, sehingga perbedaan-perbedaan itu harus dikelola secara bijaksana.<sup>33</sup> Sejauh ini secara makro sikap inklusifitas masyarakat Indonesia berkembang dengan baik, seperti penghargaan terhadap perbedaan agama, perbedaan bahasa dan budaya daerah serta perbedaan adat istiadat berjalan harmonis. Akan tetapi implementasi pendidikan inklusif pada aspek budaya masih pada tataran mikro, masih menghadapi tantangan yang cukup berat.

Tantangan yang bersifat budaya pada tataran mikro, belum tumbuh sikap menerima dan menghargai perbedaan. Sesungguhnya paham pendidikan inklusif menghendaki adanya penghargaan pada martabat manusia secara menyeluruh. Sikap belum bisa menerima dan menghargai perbedaan tercermin dalam

---

<sup>31</sup> Yayasan sayangi Tunas Cilik, *Pendidikan inklusif: Apa, Mengapa dan Bagaimana*, (Bandung: Inclusive Community Development and School for All, 2016). 41

<sup>32</sup> Hasan, Y. *Sistem Pendidikan Inklusi Memberantas Diskriminasi*. (2009)

<sup>33</sup> David Wijaya, *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2019),, hlm. 27

perilaku guru, kepala sekolah, para orang tua, dan para pengambil kebijakan seperti masih adanya diskriminasi terhadap individu yang berbeda dari orang kebanyakan seperti karena disabilitas, budaya/agama atau karena alasan ekonomi. Oleh karena itu individu yang berbeda tersebut masih mengalami kesulitan untuk diterima di lingkungan masyarakat khususnya di lingkungan pendidikan/sekolah.

## 2) Tantangan yang Bersifat Kebijakan

Kebijakan pemerintah Indonesia tentang pendidikan inklusif sudah sangat memadai.<sup>34</sup> Hal ini bisa dilihat dari perundang-undangan dan peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, misalnya 1) di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional secara eksplisit disebutkan bahwa siswa yang memiliki kebutuhan khusus dalam pendidikan dapat mengikuti pendidikan secara inklusif pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan atau dapat mengikuti pendidikan pada jalur pendidikan khusus, 2) undang-undang perlindungan anak yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak semua anak, 3) undang undang disabilitas yang baru saja diluncurkan, menjamin hak dan perlindungan individu disabilitas termasuk menjamin hak pendidikan. Akan tetapi yang masih menjadi tantangan besar adalah belum ada konsistensi yang jelas antara undang-undang/peraturan yang sudah dibuat dengan implementasinya.<sup>35</sup> Dengan kata lain masih ada kesenjangan yang lebar antara undang-undang/peraturan dengan pelaksanaannya. Apa yang tertulis dalam undang-undang belum bisa dilaksanakan secara penuh.

---

<sup>34</sup> Darma, I. P., & Rusyidi, B. Pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, (2015 vol.2). 2

<sup>35</sup> Yayasan sayangi Tunas Cilik, *Pendidikan inklusif: Apa, Mengapa dan Bagaimana*, (Bandung: Inclusive Community Development and School for All, 2016). 45

Dilihat dari kebijakan anggaran dan dana yang disediakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya program dan kegiatan yang dilakukan misalnya workshop, pelatihan, bimbingan teknis untuk mengimplementasikan pendidikan inklusif sudah sangat banyak dilakukan. Akan tetapi kelihatannya ada ketidaksesuaian antara rencana kebijakan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Dengan kata lain banyak kebijakan yang diambil tidak sesuai dengan kebutuhan nyata dalam pengembangan pendidikan inklusif di lapangan.

### 3) Tantangan yang Bersifat Praktik

Tantangan yang bersifat praktik, pendidikan inklusif secara nasional sudah mulai diimplementasikan di beberapa sekolah yang tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih banyak kekeliruan. Hal ini disebabkan karena para praktisi maupun pemangku kebijakan di daerah masih belum memahami pendidikan inklusif secara utuh dan baik. Kekeliruan-kekeliruan itu meliputi ;<sup>36</sup>

#### a) Kendala guru

Guru memiliki banyak kendala dan permasalahan.<sup>37</sup> Seperti kurangnya Guru Pendamping Kelas (GPK). Latar belakang pendidikan tidak sesuai. Beban administrasi yang sangat berat, kurangnya kesabaran dalam menghadapi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Kesulitan dalam interaksi

---

<sup>36</sup> David Wijaya, *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2019),  
49

<sup>37</sup> Maftuhatin, L. (2014). Evaluasi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kelas Inklusif di SD Plus Darul Ulum Jombang. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 201

dengan orang tua. Semua kendala tersebut hampir dialami kebanyakan sekolah inklusi.

b) Orangtua

Orangtua memiliki banyak miskonsepsi dan kendala.<sup>38</sup> Diantaranya adalah kurang peduli terhadap penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Kurangnya pemahaman tentang Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Merasa malu sehingga menginginkan anaknya bersekolah di sekolah umum, buta huruf, kurang sabar menangani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), pengasuhan Tunggal.

c) Siswa

Setiap siswa memiliki permasalahan yang berbeda dan memerlukan penanganan yang berbeda.<sup>39</sup> Diantaranya memiliki kesulitan mengikuti materi pelajaran. Belum bisa mengikuti aturan sehingga mengganggu proses KBM. Respon siswa reguler terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang melebihi kuota dalam setiap kelasnya.

d) Manajemen Sekolah

Manajemen sekolah inklusi yang tidak terkonsep dengan sangat baik akan mengalami banyak kendala dalam prosesnya.<sup>40</sup> Kendala yang muncul adalah belum siap dengan program sekolah Inklusi dari segi administrasi dan SDM. Proses KBM yang belum berjalan maksimal. Belum ada program pertemuan rutin dengan orangtua tentang sosialisasi sekolah inklusi.

---

<sup>38</sup> Tarnoto, N. (2016). Permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi pada tingkat sd. *Humanitas: Jurnal Psikologi Indonesia*, 13(1), 50

<sup>39</sup> Fitria, R. (2012). Proses pembelajaran dalam setting inklusi di sekolah dasar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Khusus*, 1(1), 90

<sup>40</sup> Tarnoto, N. (2016). Permasalahan-permasalahan yang dihadapi sekolah penyelenggara pendidikan inklusi pada tingkat sd. *Humanitas: Jurnal Psikologi Indonesia*, 13(1), 50

e) Pemerintah

Pemerintah memiliki andil dalam keberhasilan sekolah inklusi.<sup>41</sup> Namun berikut adalah kendala yang terkait dengan pemerintah diantaranya adalah kurangnya perhatian dan kepedulian terhadap pelaksanaan sekolah inklusif, kebijakan pelaksanaan sekolah inklusi belum jelas, belum ada modifikasi kurikulum khusus sekolah inklusi, kurangnya pelatihan tentang pendidikan inklusi kepada guru, kurangnya perhatian terhadap tenaga profesional yang mendukung sekolah inklusi dari segi jumlah dan kesejahteraan, program yang dilakukan belum berkelanjutan, belum ada lembaga khusus yang menangani pelatihan pendampingan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)

f) Masyarakat

Masyarakat yang belum mendapatkan proses sosialisasi dengan baik akan memberikan dampak yang kurang baik bagi terlaksananya program sekolah inklusi.<sup>42</sup> Kendala-kendala yang berhubungan dengan masyarakat adalah Minimnya pengetahuan masyarakat terkait pendidikan inklusi dan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), adanya pandangan negatif masyarakat terhadap Anak, berkebutuhan Khusus (ABK) dan sekolah inklusi, kurangnya dukungan terkait pelaksanaan inklusi.

## **B. Madrasah Ibtidaiyah Hebat Bermartabat**

### **1. Pengertian Hebat Bermartabat**

Kementerian Agama memiliki motto yang berbunyi “Madrasah Hebat Bermartabat” yang di gemakan pada tahun 2018 yang sebelumnya berbunyi “Madrasah Lebih Baik, Lebih Baik Madrasah”. Bila dipahami motto “Hebat

---

<sup>41</sup> Darma, I. P., & Rusyidi, B. (2015). Pelaksanaan sekolah inklusi di Indonesia. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(2).

<sup>42</sup> Yayasan sayangi Tunas Cilik, *Pendidikan inklusif: Apa, Mengapa dan Bagaimana*, (Bandung: Inclusive Community Development and School for All, 2016), 46

Bermartabat” bersumber dari kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), “bermartabat” mengandung arti mempunyai martabat, sedangkan “martabat” mengandung arti tingkat harkat kemanusiaan, harga diri.<sup>43</sup> melalui sistem pendidikan nasional yang berdasar Pancasila dan UUD 1945 sebagai kristalisasi nilai-nilai hidup bangsa Indonesia diharapkan kepada setiap rakyat agar dijadikan sebagai pegangan hidup, terutama dalam mempertahankan hidupnya, mengembangkan dirinya dan secara bersama-sama membangun masyarakatnya, sehingga menjadi bangsa yang bermartabat di mata dunia.

Bermartabat mengandung makna memiliki harga diri, jati diri dan integritas sebagai bangsa.<sup>44</sup> Definisi “Madrasah Bermartabat” juga dimaknai sebagai madrasah yang menjunjung harkat kemanusiaan setiap orang (anak), termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK), dengan cara memberikan akses dan pendidikan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan perkembangannya dalam berbagai aspek (intelektual, emosional, sosial, fisik, dan spiritual) melalui penyelenggaraan pendidikan inklusif.

## 2. Humanisme dalam Pendidikan Inklusi

Humanis yang berasal dari akar kata human dengan segala bentuk derivasinya, yang kesemuanya memiliki arti yang berbeda antara satu dengan yang lain.<sup>45</sup> Kata “*human*” memiliki arti: (1) bersifat manusiawi, (2) berperikemanusiaan (baik budi, luhur budi, dan sebagainya).<sup>12</sup> Kata “*humanis*” memiliki arti: (1) orang yang mendambakan dan memperjuangkan terwujudnya

---

<sup>43</sup> Rabiatul Awwaliyah, *Pendidikan Islam dalam sistem Nasional (Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam)*, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA vol. 19, no. 1, Agustus 2018, 40

<sup>44</sup> Dasopang, M. D. (2015). Menarik benang merah basis pendidikan Islam bermartabat. *DARUL ILMI: Jurnal Ilmu Kependidikan dan Keislaman*, 3(2), 1

<sup>45</sup> Mustakim, M. (2014). Kurikulum Pendidikan Humanis Religius. *Jurnal Ilmu Tarbiyah At-Tajdid*, 3(1).

pergaulan hidup yang lebih baik, berdasarkan azas-azas kemanusiaan; pengabdian kepentingan sesama umat manusia, dan (2) penganut paham yang menganggap manusia sebagai objek yang terpenting.

Humanisme dalam arti filsafat diartikan sebagai paham filsafat yang menjunjung tinggi nilai dan martabat manusia sedemikian rupa sehingga manusia menempati posisi yang sangat netral dan penting dalam kehidupan sehari-hari.<sup>46</sup> Pendidikan humanistik memandang manusia sebagai manusia, yaitu merupakan ciptaan Tuhan dengan fitrah-fitrah tertentu, untuk berkembang dan hidup secara optimal dan maksimal. Pendidikan humanistik bermaksud untuk membangun manusia yang memiliki komitmen dan prinsip humaniter sejati. Manusia yang memiliki kesadaran tanggung jawab sebagai manusia individu serta memiliki kebebasan. Selain itu pendidikan yang mampu memperkenalkan apresiasinya yang tinggi kepada manusia sebagai makhluk Allah yang mulia dan bebas serta dalam batas-batas eksistensinya yang Hakiki dan juga sebagai khalifatullah.

Pendidikan inklusi mewujudkan tujuan humanisme dengan memandang seseorang tidak hanya melihat warna kulitnya semata, antara kulit hitam dan kulit putih.<sup>47</sup><sup>48</sup> Dan tidak melihat seseorang dari struktur sosialnya saja bersikap netral dengan memberikan nilai-nilai kemanusiaan dan pengalaman hidup. Humanisasi dalam pendidikan inklusi senantiasa menjalin hubungan yang dialogis dengan pihak manapun, memberikan kebebasan yang luas dan saling menghargai untuk berpikir kritis. Selain itu proses pemberdayaan masyarakat melalui ilmu

---

<sup>46</sup>Kharisul Wathoni, *Implementasi Pendidikan Inklusi dalam Pendidikan Islam*, Jurnal Ta'allum, Vol. 1 No.1 Juni 2013, 99

<sup>47</sup> Laurens, J. M., & Tanuwidjaja, G. *Melalui Pendekatan Desain Inklusi Menuju Arsitektur yang Humanis* (Doctoral dissertation, Petra Christian University, 2012).

<sup>48</sup> Suyadi, S. PENDIDIKAN ISLAM INKLUSI HUMANIS DAN RELIGIUS. *Tajdidukasi: Jurnal Penelitian dan Kajian Pendidikan Islam*, 7(2018, 2), 15.

pengetahuan, transformasi dunia yang adil dan tidak menindas. Pendidikan inklusi juga menstandarkan agar menciptakan ilmu pengetahuan baru untuk perkembangan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

Tanggal 10 Desember 1948 lahirlah deklarasi HAM sebagai perjanjian Global terkait dengan penegakan HAM dalam kehidupan manusia. Titik munculnya deklarasi ini tidak hanya memperjelas konsep hak asasi yang dimiliki manusia tetapi juga ditandai dengan dipakainya istilah lebih bebas gender di dalam bahasa Inggris yaitu *women*.<sup>49</sup> Deklarasi tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada setiap individu yang merasa mendapatkan tindakan diskriminatif dari orang-orang tidak bermoral. Dengan demikian masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan adil apabila suatu saat diperlakukan sewenang-wenang. Dari sekian banyak persoalan terkait HAM, implementasi deklarasi HAM tidak memberi hasil yang memuaskan bagi masyarakat.

Perjuangan manusia untuk mendapatkan hak pendidikan yang layak juga perlu dipertimbangkan terlepas dari sejarah munculnya HAM dalam konteks masa kini. Deklarasi universal HAM 1948 menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak atas pendidikan. Siapa saja di dunia perlu mendapatkan hak pendidikan atas kemanusiaan yang terus-menerus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Perjuangan untuk membantu Setiap anak merupakan perbuatan mulia karena berkaitan langsung dengan masa depan dan kesejahteraan mereka. Semangat untuk membantu anak berkebutuhan khusus semakin gencar dilakukan apalagi jika perjuangan itu menyangkut hak untuk memperoleh pendidikan dan belajar di sekolah reguler.

---

<sup>49</sup> David Wijaya, *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2019), 74

Pendidikan inklusi menjadi cerminan dari perjuangan menegakkan HAM.<sup>50</sup> Pendidikan inklusi merupakan inti dari HAM untuk memperoleh pendidikan, hal ini telah dinyatakan dalam deklarasi universal tentang HAM pada tahun 1949 kesamaan kepentingan adalah hak anak agar tidak didiskriminasikan yang dinyatakan pada pasal 2 dari konvensi tentang hak anak. Konsekuensi logis dari hak anak adalah semua anak memiliki hak untuk menerima jenis pendidikan yang tidak diskriminatif berdasarkan kemampuan etnis agama bahasa gender kapabilitas, dan sebagainya.

### 3. Memanusiakan Hubungan dalam Pendidikan Inklusi

Kekuatan utama pendidikan adalah relasi dan interaksi yang terjadi. Dalam kenyataannya, banyak yang mengatakan kekuatan utama pendidikan justru mengacu pada standarisasi sehingga titik keunikan yang melekat pada manusia berubah menjadi kelemahan dan bukan kekuatan.<sup>51</sup> Di lapangan, proses belajar mengajar sering melupakan pendekatan kemanusiaan bahkan guru-guru yang sudah berkarya puluhan tahun namanya sering merasa lebih bertanggung jawab kepada benda mati seperti dokumen kurikulum atau pelaksanaan kebijakan dibanding manusia kecil atau dewasa yang hidup di depan mata. Dalam banyak sektor kehidupan, hubungan dinilai menjadi modal utama perjalanan dan kesuksesan.

Memanusiakan hubungan berarti meningkatkan kualitas belajar mengajar secara signifikan.<sup>52</sup> Memanusiakan hubungan meliputi berbagai praktik yang berpusat pada anak menunjukkan empati dan memahami orang lain sebagai pelajar

---

<sup>50</sup> Rohmah, M. S. (2010). *Pendidikan agama Islam dalam setting pendidikan inklusi*. (2010)

<sup>51</sup> Najelaa Shihab & Komunitas Guru Belajar, *Memanusiakan Hubungan*, (Tangerang Selatan, : Literasi, 2018), 2

<sup>52</sup> *Ibid* Hal. 37

Merdeka dengan segala kompetensinya serta membangun beragam relasi dalam ekosistem kelas, Sekolah bahkan masyarakat.<sup>53</sup>

a. Berpusat pada anak

Perilaku yang muncul dari siapapun yang terlibat dalam pendidikan harus fokus pada kebutuhan anak untuk tumbuh kembang secara mandiri dengan melibatkan orang dewasa di sekitarnya.<sup>54</sup> Pendidikan yang memanusiakan hubungan selalu berangkat dari pengenalan karakteristik anak dan menyesuaikan dengan kesiapan anak.

b. Menunjukkan Empati

Empati pendidik menunjukkan kepekaan terhadap perilaku orang lain dan perubahannya untuk memahami sudut pandang yang beragam.<sup>55</sup> Hanya setelah dipahami, anak-anak kita bisa memahami dan berkontribusi. Perbedaan temperamen yang dipengaruhi aspek biologis, pengalaman, dan kontak sosial tempat anak dan keluarga tumbuh, seringkali Tidak Dianggap sebagai kekayaan yang dimanfaatkan tetapi dianggap hambatan, karena sulit diseragamkan dalam memahami bahwa anak punya minat dan bakat yang berbeda bukan sekedar dengan mengklasifikasikan anak dalam tipe tertentu. Pemahaman ini selalu dimulai dengan penerimaan pada keberagaman dalam

---

<sup>53</sup> Habudin, I. Konstruksi Pendidikan yang Memanusiakan Manusia: Transformasi Pemikiran Paulo Freire dalam Konteks Pendidikan Inklusif. *DIFABEL*, 1.

<sup>54</sup> Najelaa Shihab & Komunitas Guru Belajar, *Memanusiakan Hubungan (Tangerang Selatan,: Literati, 2018)*. 2

<sup>55</sup> Najeela Shihab, *Keluarga Kita, Mencintai Dengan Lebih baik*, (tangerang Selatan: Buah hati, 2017), hal. 37

pendidikan bahwa setiap anak setiap guru, setiap orang tua, setiap sekolah punya keunikan.<sup>56</sup>

Kemampuan mendeteksi dan mendiagnosa kebutuhan yang beragam harus dilihat sebagai kesempatan untuk memanusiakan hubungan, melakukan lebih banyak hal yang memastikan Setiap anak mencapai keberhasilan dan memperoleh pendidikan yang setara.<sup>57</sup> Ini merupakan cita-cita penting, bukan karena jumlah anak atau data statistik semata melainkan tentang komitmen menggerakkan sumber daya pada setiap warga negara. Tekad pendidikan untuk memberikan pendidikan yang setara kepada setiap jenis anak serta mendukung anak ini menjadi identitas untuk menjamin pemenuhan hak sebagai anak dan warga negara yang utuh dan membantu anak mengenal dan mengaktualisasi diri sesungguhnya, reaksi negatif pada paradigma ini hanya akan terjadi pada masyarakat yang minim toleransi bila semua masyarakat bersepakat pada tujuan pendidikan inklusi menumbuhkan kualifikasi Setiap anak dengan membangun dari keunikannya bukan hanya membicarakan kelemahannya.

Proses pendidikan inklusi bukan hanya membantu anak menyesuaikan diri dengan lingkungan tanpa batasan tetapi juga membantu lingkungan mengakomodasi kebutuhan individual tanpa menyeragamkan.<sup>58</sup> Masyarakat merupakan jaringan sosial yang ikut mempengaruhi pencapaian semua anak di sekitar dalam belajar. Pada saat sekolah dan rumah bersikap terbuka tanpa

---

<sup>56</sup> Hadjar, D. (2010). Empati Siswa Reguler terhadap Siswa Berkebutuhan Khusus di Kelas Inklusi SMP Negeri 18 Malang. *SKRIPSI Jurusan Bimbingan dan Konseling & Psikologi-Fakultas Ilmu Pendidikan UM*.

<sup>57</sup> *Ibid.* hal. 17

<sup>58</sup> Yunata, R., Hidayat, Z., Sundarso, S., & Purnaweni, H. (2016). Evaluasi Kebijakan Pendidikan Inklusi dalam Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri Sukoharjo Kabupaten Rembang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 5(2), 873

diskriminasi sesungguhnya bukan hanya ABK yang beruntung berada dalam lingkungan inklusi. Teman sebaya maupun orang dewasa, belajar banyak hal yang berarti dari empati sampai refleksi dari adaptasi hingga demokrasi.

#### 4. Pendidikan Unggul

Sekolah unggul adalah sekolah yang fokus pada kualitas proses pembelajaran bukan pada kualitas input siswanya.<sup>59</sup> Kualitas proses pembelajaran bergantung pada kualitas para guru yang bekerja di sekolah tersebut. Apabila kualitas guru di sekolah tersebut baik mereka akan berperan sebagai agen pengubah siswanya. Sekolah unggul adalah sekolah yang para gurunya mampu menjamin semua siswa akan dibimbing ke arah perubahan yang lebih baik, bagaimanapun kualitas akademis dan moral yang mereka miliki.<sup>60</sup> Dengan kata lain sekolah yang pendidikannya mampu mengubah kualitas pembelajaran akademis dan moral siswanya dari negatif menjadi positif itulah sekolah unggul.<sup>61</sup> Salah satu resiko bagi pelaksana pendidikan yang berani mengklaim sekolahnya adalah sekolah unggul maka mereka harus dengan senang hati menerima semua siswa apa adanya dan tanpa memilih siswa dengan tes seleksi. Karena, prinsip sekolah tersebut meyakini bahwa tidak ada siswa yang bodoh.

Sekolah unggul adalah sekolah yang memanusiakan manusia, dalam arti menghargai setiap potensi yang ada pada diri siswa.<sup>62</sup> Sekolah yang membuka pintunya pada semua siswa, bukan dengan menyeleksinya dengan tes-tes formal yang memiliki interval nilai berupa angka-angka untuk menyatakan batasan

---

<sup>59</sup>Munif chatib, *Sekolahnya Manusia*, (Bandung: Kaifa, 2011), 93

<sup>60</sup>Rahmah, S. (2016).Mengenal sekolah unggulan. *ITQAN: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 7(2016,1), 1

<sup>61</sup> Amin, R. . Titik Singgung Pendidikan Agama Islam dengan Paradigma Pendidikan Inklusi (Anak Berkebutuhan Khusus). *Al-Makrifat: jurnal kajian Islam*, 1(2016, 1), 1-22.

<sup>62</sup>Mustakim, M. (2014). Kurikulum Pendidikan Humanis Religius. *Jurnal Ilmu Tarbiyah At-Tajdid*, 3(1).2014,3

diterima atau tidak. Setiap sekolah harus berani menjadi sekolah Manusia yaitu sekolah yang terbuka untuk menerima siswa dalam berbagai kondisi.<sup>63</sup>

## 5. Pendidikan Inklusi di Madrasah Ibtidaiyah

Madrasah Ibtidaiyah (MI) Secara Bahasa terdiri dari dua suku kata yaitu Madrasah dan Ibtidaiyah.<sup>64</sup> Madrasah Ibtidaiyah Secara Istilah adalah jenjang paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia, setara dengan Sekolah Dasar, yang pengelolaannya dilakukan oleh Kementerian Agama. Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah ditempuh dalam waktu 6 tahun, mulai dari kelas 1 sampai kelas 6. Lulusan Madrasah Ibtidaiyah dapat melanjutkan pendidikan ke Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama. Kurikulum Madrasah Ibtidaiyah sama dengan kurikulum Sekolah Dasar, hanya saja pada MI terdapat porsi lebih banyak mengenai Pendidikan Agama Islam.

Madrasah Ibtidaiyah merupakan sekolah Dasar Islam.<sup>65</sup> Tugas dari sebuah pendidikan Islam yaitu membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan peserta didik dari tahap ke tahap kehidupannya sampai mencapai titik kemampuan optimal. Madrasah Ibtidaiyah adalah lembaga pendidikan keagamaan di bawah naungan Kementerian Agama patut menjadi layanan pendidikan yang senantiasa menerima keanekaragaman dan menghargai perbedaan yang ada. Madrasah Ibtidaiyah yang merupakan pendidikan tingkat dasar, memiliki kesempatan yang sama untuk mengambil peran sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam yang memanusiakan hubungan. Sebagai penyelenggara pendidikan berbasis agama Islam, Madrasah tidak dapat dipisahkan dengan nilai

---

<sup>63</sup> Najeela Shihab & KGB, *Memanusiakan Hubungan* (Tangerang Selatan,: Literati, 2018). 30

<sup>64</sup> Rabiatul Awwaliyah, *Pendidikan Islam dalam sistem Nasional (Telaah Epistemologi Terhadap Problematika Pendidikan Islam)*, Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA vol. 19, no. 1, Agustus 2018, 40

<sup>65</sup> Wibowo, A. M., Fakhruddin, F., Rifai, A., & Prihatin, T. (2019). Model Peningkatan Sumber Daya Pendidik Pada Madrasah Ibtidaiyah Inklusi Menghadapi Era Society 5.0 dan Revolusi Industri 4.0. In *Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana (PROSNAMPAS)* (Vol. 2, No. 1, pp. 64).

keagamaan, terlebih Interaksi yang terjadi dalam lingkup pendidikan tidak dapat dipisahkan dari hakikat manusia sebagai makhluk sosial.<sup>66</sup> Hikmah Allah menciptakan beragam perbedaan agar roda kehidupan berjalan dengan baik. Seandainya manusia diciptakan dalam keadaan yang sama maka hancurlah sistem kehidupan ini. Hal ini tertuang dalam Al Qur'an surah Az Zukhruf ayat 32:<sup>67</sup>

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ ۗ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَرَفَعْنَا  
بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلَخِيًّا ۗ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا  
يَجْمَعُونَ

Artinya:

*“Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan”*

Allah telah menciptakan segala hal yang ada di bumi ini dengan seimbang tanpa cela dan berbentuk sesuai dengan fungsi masing-masing. Maka memandang setiap ciptaan Allah pasti istimewa dan selalu berlaku adil terhadap ciptaan-Nya merupakan suatu keniscayaan bagi umat Islam. Terutama bagi pelaksana pendidikan Islam dalam bersikap terhadap keistimewaan dalam keberagaman para peserta didik. Hal ini telah dijelaskan dalam Quran Surat Al Mulk ayat 3:<sup>68</sup>

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۗ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفْوُتٍ ۗ فَإِذْ جِئَ  
الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ

Artinya:

---

<sup>66</sup> Mentari, L. K. (2020). Peran Madrasah dalam Membentuk Kehidupan Pendidikan Humanis, Inklusif, dan Religius. *EDUKASIA: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(1), 14

<sup>67</sup>Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir A-Muyassar Jilid V*, (Malang: PT. Citra Intan Selaras, 2019), hlm. 406

<sup>68</sup>Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir A-Muyassar Jilid VI*, (Malang: PT. Citra Intan Selaras, 2019), hlm. 272

*“Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis, kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan Yang Maha pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang adakah kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang.*

Al Qur’an surah Ar-ra’d ayat 8 juga menjelaskan.<sup>69</sup>

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ

Artinya:

*“Allah Mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. Dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya.”*

Dari beberapa firman Allah yang sudah disebutkan kita dapat memahami bahwa Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin merupakan agama yang mengakui perbedaan individu antara yang satu dengan yang lainnya sebagai sebuah Rahmat, ini bertujuan agar para Manusia saling mengenal dan saling memahami antara satu dengan yang lainnya, dan tiada saling merasa paling hebat dan mulia antara satu dengan lainnya sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran surah Al Hujurat ayat 13:<sup>70</sup>

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”*

---

<sup>69</sup>Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir A-Muyassar Jilid III*, (Malang: PT. Citra Intan Selaras, 2019), hlm. 245

<sup>70</sup>Kojin Mashudi, *Telaah Tafsir A-Muyassar Jilid VI*, (Malang: PT. Citra Intan Selaras, 2019), hlm. 57

Ayat Al Quran surat Al Hujurat tersebut diperkuat oleh sabda Rasulullah SAW yang menjelaskan bahwa Allah tidak melihat bentuk fisik, harta seorang muslim, akan tetapi Allah melihat hati dan perbuatannya. Berikut adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim:<sup>71</sup>

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ

Artinya:

*“Sungguh Allah tidak melihat rupa dan harta kalian, melainkan melihat hati dan amal kalian.”HR. Muslim*

Sumber utama dalam Islam tersebut menjelaskan bahwa pendidikan inklusi menanamkan nilai pendidikan sosial terhadap peserta didik baik anak berkebutuhan khusus maupun anak normal sejak dini.<sup>72</sup> Dalam perspektif pendidikan inklusi antara anak satu dengan yang lain saling menghargai perbedaan dan menghilangkan sikap diskriminatif. Pendidikan inklusi merupakan ideologi yang lazim kita raih.<sup>73</sup> Dan Madrasah Ibtidaiyah yang berbasis pendidikan agama islam seyogyanya ambil peran dalam pelaksanaan pendidikan inklusi sehingga layak disebut madrasah Hebat Bermartabat.

## C. Pendidikan Berbasis Inklusi dalam Mewujudkan MI Hebat Bermartabat

### 1. Desain dan Perencanaan

#### a. Persiapan Sistem dan Manajemen Pendidikan Inklusif

Manajemen pendidikan adalah suatu proses yang merupakan daur atau siklus penyelenggaraan pendidikan dimulai dari perencanaan diikuti oleh

---

<sup>71</sup>Al Imam Abi Husain Muslim Bin Al-Hajjaj, Shahih Muslim ( Kairo: Daar Ibnu Al haitham 2001), 655

<sup>72</sup>Dewi, N. K. (2017). Manfaat Program Pendidikan Inklusi untuk AUD. *Jurnal Pendidikan Anak*, 6(1), 12

<sup>73</sup>Baharun, H., & Awwaliyah, R. (2018). Pendidikan Inklusi Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Epistemologi Islam. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 5(1), 57

pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian tentang usaha sekolah mencapai tujuannya.<sup>74</sup>

b. Observasi dan Asesmen Awal

Mengumpulkan dan menganalisis informasi yang luas terkait keterampilan perilaku adaptif siswa, karakteristik dan kebutuhan fisik, medis dan psikologis; kelebihan dan keterbatasan lingkungan.<sup>75</sup>

c. Wawancara Orangtua/Wali Peserta Didik

Pelaksanaan wawancara terhadap orang tua menjadi poin penting untuk melaksanakan pendidikan inklusi karena dari hasil wawancara tersebut guru mampu melaksanakan deteksi pada anak berkebutuhan khusus agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin. Beberapa informasi penting yang perlu digali dari orang tua calon peserta didik anak berkebutuhan khusus meliputi:<sup>76</sup>

- 1) Deteksi dini penyimpangan pertumbuhan. Dalam kaitanya dengan pemenuhan kasus gizi kurang atau gizi buruk pada anak.
- 2) Deteksi dini penyimpangan perkembangan untuk mengetahui gangguan perkembangan anak berupa keterlambatan bicara dan berjalan, gangguan daya dengar, gangguan daya tangkap informasi.
- 3) Deteksi dini penyimpangan mental emosional untuk mengetahui adanya masalah mental autisme emosional dan gangguan pemusatan perhatian serta hiperaktivitas.

d. *Focus Group Discussion* (FGD), *Workshop*, Seminar, dan Kunjungan Pendidikan

---

<sup>74</sup>David Wijaya, *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2019),84

<sup>75</sup>Farisia, H. (2017). Strategi Optimalisasi Kemampuan Belajar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) melalui Program Pembelajaran Individual (PPI) .*SELING: Jurnal Program Studi PGRA*, 3(2), 7

<sup>76</sup>Desiningrum, D. R. *Psikologi anak berkebutuhan khusus*. (Jakarta: Kencana, 2017), 38

Diskusi kelompok terpimpin (FGD) dilakukan dengan tujuan untuk mendapat masukan atau informasi yang lebih komprehensif, tajam, rinci, dan akurat tentang permasalahan-permasalahan spesifik yang terkait dengan hasil survey yang telah dilakukan tentang pendidikan inklusif di Tingkat Nasional.<sup>77</sup> Kegiatan ini akan melibatkan berbagai pihak yang terkait sebagai narasumber, yaitu:

- 1) Praktisi : Kepala sekolah, GPK, Guru BK, Guru Mapel sekolah inklusi yang terpilih.
- 2) Birokrat : Dinas Pendidikan, pengawas Provinsi/kab/kota mulai dari Pengawas TK-SMP terpilih.
- 3) Akademisi: Dosen Dept PKh FIP dan Prodi PKh SPS pengampu mata kuliah Pendidikan Inklusif, dan pakar-pakar di bidang Pendidikan Inklusif.
- 4) Pemerhati :Ormas, LSM, dan komunitas peduli Pendidikan Inklusif yang terpilih.
- 5) Pihak lain yang terkait, seperti Orang tua ABK.

e. Media, Sarana, dan Prasarana

Penyelenggara pendidikan inklusif seharusnya mempunyai bangunan sekolah dengan kriteria, sebagai berikut : <sup>787980</sup>

- a. Mempunyai aksesibilitas bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang mudah, aman, nyaman, serta dilengkapi pengarah jalan (*guiding block*)

---

<sup>77</sup> David Wijaya, *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2019), 118

<sup>78</sup>Karana, D. P. (2016).Implementasi Manajemen Pendidikan Inklusif di SD Negeri Gadingan Wates dan MI Ma'arif Pagerharjo Samigaluh.*Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan*, 4(1), 63

<sup>79</sup>Yusuf, M. (2012).Kinerja kepala sekolah dan guru dalam mengimplementasikan pendidikan inklusif.*Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 18(4), 382-393.

<sup>80</sup> David Wijaya, *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2019),. 136

untuk peserta didik berkebutuhan khusus tunanetra, akses jalan (*ramp*) untuk peserta didik berkebutuhan khusus tunadaksa ringan.

- b. Terhindar dari gangguan kebisingan dan getaran serta memiliki penghawaan dan pencahayaan yang baik.
  - c. Mempunyai tanda peringatan bahaya, pintu keluar darurat, dan jalur evakuasi yang dilengkapi penunjuk arah jika terjadi kebakaran dan/atau bencana lain.
  - d. Mempunyai tanda peringatan bunyi untuk siswa tunanetra, tanda peringatan lampu untuk siswa tunarungu, serta tanda peringatan bunyi dan lampu untuk semua peserta didik.
  - e. Mempunyai ruang khusus atau ruang sumber.
  - f. Mempunyai media, yaitu alat khusus yang diperlukan di dalam pembelajaran anak berkebutuhan khusus.
- f. Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Madrasah inklusi harus memiliki pendidik yang berkompetensi mendampingi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Sebagaimana diamanatkan dalam PP nomor 90 tahun 2013 pasal 35 yang menyebutkan bahwa setiap madrasah yang melaksanakan pendidikan inklusi wajib memiliki pendidik yang memiliki kompetensi untuk menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik dengan kebutuhan khusus.<sup>81</sup> Guru pendamping khusus terlibat aktif dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembelajaran Individual (PPI) sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran untuk siswa berkebutuhan

---

<sup>81</sup>Zakia, D. L. (2015). Guru Pembimbing Khusus (Gpk): Pilar Pendidikan Inklusi. *Prosiding Ilmu Pendidikan*, 1(2), 112.

khusus, dan dalam pelaksanaannya PPI ini akan diimplementasikan di kelas reguler oleh guru kelas dan guru pendamping khusus.<sup>82</sup>

g. Sosialisasi Paradigma ABK dan Pendidikan Inklusif

Grinder menjelaskan untuk mencapai kebahagiaan, seseorang memerlukan afeksi, keberhasilan dan penerimaan sosial, ini diartikan sebagai perhatian positif dari orang lain. Sedangkan menurut Hurlock menyebutkan bahwa penerimaan sosial berarti dipilih sebagai teman untuk suatu aktivitas dalam kelompok dimana seseorang menjadi anggota. Penerimaan sosial menunjukkan suatu keberhasilan seorang anak untuk berperan di dalam kelompoknya dan bekerja atau bermain dengannya.<sup>83</sup>

a) Terhadap anak reguler

Penerimaan sosial menjadi salah satu hal yang penting terutama bagi pertumbuhan anak usia dini.<sup>84</sup> Tanpa adanya penerimaan dari teman sebaya, lawan jenis atau sesama jenis, maka akan menimbulkan gangguan psikis dan sosial yang bersangkutan. Maka penting sekali Sebuah sekolah inklusi juga memberikan sosialisasi tentang Anak berkebutuhan Khusus (ABK) agar mereka tidak mengucilkan keberadaan siswa ABK.

b) Terhadap orangtua/wali peserta didik anak reguler

Orangtua siswa dengan ataupun tanpa hambatan harus memahami rencana untuk membentuk suatu lingkungan inklusi dan ramah bagi setiap siswa. Sosialisasi adalah bentuk upaya agar program sekolah inklusi bisa berjalan dengan baik. Orang Tua peserta didik anak reguler yang se

---

<sup>82</sup> Farisia, H. (2017). Strategi Optimalisasi Kemampuan Belajar Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) melalui Program Pembelajaran Individual (PPI). *SELING: Jurnal Program Studi PGRA*, 3(2), 1, 6

<sup>83</sup> David Wijaya, *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2019), 44

<sup>84</sup> Stella Olivia, *Pendidikan Inklusi untuk Anak-Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017). 37

paradigma dan dilibatkan akan memberikan dampak lingkungan pendidikan yang mendukung.

c) Terhadap Masyarakat

Melalui publikasi media dan sekolah, masyarakat harus diberi tahu dan dilibatkan dalam usaha-usaha meningkatkan keterlibatan dan diterimanya siswa penyandang hambatan di dalam kehidupan sekolah. Penerimaan ini harus didorong untuk memperluas penerimaan di dalam masyarakat itu sendiri.

h. Kerjasama Lembaga Terkait

Anak dengan kebutuhan khusus telah menjadi isu yang diperhatikan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah, sehingga berdirilah lembaga sosial untuk memenuhi kebutuhan dari anak dengan keterbatasan atau kekhususan yang dimiliki seperti kebutuhan medis dan psikologi klinis maka pemerintah mendirikan Pusat Layanan Autis (PLA) dan Babel yang merupakan lembaga pemerintah yang menangani anak berkebutuhan khusus dengan diagnosa autisme, sedangkan Lembaga Psikologi Terapan (LPT) Personal sebagai lembaga swasta yang menangani berbagai jenis anak berkebutuhan khusus.<sup>8586</sup>

## 2. Pelaksanaan Pendidikan Inklusi

Pelaksanaan pendidikan inklusif yang perlu dilakukan mencakup aspek-aspek berikut:

1. Model Kelas

---

<sup>85</sup> Ayu Sandra, P. D. M. (2019). FUNGSI DAN RELASI LEMBAGA SOSIAL DALAM PENANGANAN ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS. *Scripta: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(2), 142

<sup>86</sup> David Wijaya, *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2019), 45

Model-model pembelajaran dalam pendidikan inklusi yang sudah disesuaikan dengan tingkat kebutuhan baik peserta didik normal maupun berkebutuhan khusus meliputi:<sup>878889</sup>

a) Model kelas reguler ( inklusi penuh)

Pada model kelas reguler anak berkebutuhan khusus yang tidak mengalami gangguan intelektual signifikan dapat mengikuti pembelajaran di kelas reguler.<sup>90</sup> Dalam pelaksanaannya anak berkebutuhan khusus ikut belajar bersama dengan siswa lainnya sehingga mereka dapat berinteraksi dengan intensif.

b) Model *cluster*

Dalam model kelas ini anak berkebutuhan khusus dikelompokkan tersendiri meskipun masih dalam satu ruangan.<sup>91</sup> Anak berkebutuhan khusus tidak dapat berinteraksi penuh karena harus selalu didampingi oleh guru pendamping.

c) Model *Pull Out*

Model pembelajaran *pull out* merupakan model pembelajaran yang di kombinasikan di mana anak berkebutuhan khusus tidak sepenuhnya dapat

---

<sup>87</sup> Sella Olivia, *Pendidikan Inklusi untuk Anak-Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), 6

<sup>88</sup> Ibid. 6

<sup>89</sup> Sulthon, S. (2015). Mengenal Pendidikan Multikultural Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dengan Model Inklusi Dalam Pendidikan Islam. *Addin*, 7(1).

<sup>90</sup> Elisa, S., & Wrastari, A. T. (2013). Sikap guru terhadap pendidikan inklusi ditinjau dari faktor pembentuk sikap. *Jurnal Psikologi Perkembangan dan Pendidikan*, 2(01), 10.

<sup>91</sup> Ghita, A. M., Wahyuningsih, W., & Ulfa, Z. (2017). MODEL PENDIDIKAN INKLUSI BAGI ANAK USIA DINI DI PAUD TERPADU PUTRA HARAPAN PURWOKERTO. *Jurnal Penelitian Agama*, 18(2), 356

mengikuti pembelajaran reguler.<sup>92,93</sup> Ada saat-saat tertentu anak berkebutuhan khusus dipisahkan dalam ruangan tertentu untuk diberikan layanan khusus sesuai dengan kebutuhan mereka.

d) Model *cluster and Pull Out*

Model kelas ini adalah kombinasi antara model *cluster* dan *pull out*. Model pembelajaran ini dilakukan pada saat tertentu ketika anak berkebutuhan khusus dikelompokkan tersendiri tetapi masih dalam satu kelas reguler dengan pendamping khusus.<sup>94</sup> Dan pada waktu tertentu dan pada waktu tertentu anak berkebutuhan khusus akan di kelas lain untuk diberikan layanan khusus sesuai dengan kebutuhan mereka.<sup>95</sup>

e) Model kelas khusus

Model kelas khusus memiliki konsep bahwa sekolah menyediakan ruang kelas khusus bagi anak berkebutuhan khusus, tetapi untuk beberapa kegiatan pembelajaran tertentu semua peserta didik digabung dengan kelas reguler.<sup>96</sup> Selain itu ada waktu-waktu tertentu anak berkebutuhan khusus juga diperkenankan bergabung dengan anak normal akan tetapi kuantitas interaksinya sangat terbatas.

---

<sup>92</sup> Fitrianah, N.. Meningkatkan Minat Belajar Anak Inklusi Melalui Model Pull Out di MI Nurul Huda Kalanganyar Sedati. *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*. (2018)

<sup>93</sup> Mardini, S. Meningkatkan Minat Belajar Anak Berkebutuhan Khusus Di Kelas Reguler Melalui Model Pull Out Di SDN Giwangan Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar Ahmad Dahlan*, 2(2015.1), 25

<sup>94</sup> Fitrianah, N. (2018). Meningkatkan Minat Belajar Anak Inklusi Melalui Model Pull Out di MI Nurul Huda Kalanganyar Sedati. *Universitas Muhammadiyah Sidoarjo*.

<sup>95</sup> Gunarhadi, G. (2017). ENHANCING LEARNING BEHAVIOR OF STUDENTS WITH DISABILITIES THROUGH PULL-OUT CLUSTER MODEL (POCM)(A CASE STUDY ON LEARNING PROBLEMS OF STUDENTS WITH DISABILITY IN INCLUSIVE SCHOOLS). *Proceedings of the ICECRS*, 1(1).

<sup>96</sup> Nurussalihah, A. (2016). *Implementasi pembelajaran pendidikan agama Islam terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi: Studi multisitus di SDN Mojorejo 01 dan SDN Junrejo 01 Kota Batu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

f) Model khusus penuh

Pada model khusus penuh sekolah menyediakan ruang kelas khusus bagi anak berkebutuhan khusus.<sup>97</sup> Dalam proses pembelajaran dan seluruh kegiatan pada saat di sekolah anak berkebutuhan khusus hanya akan belajar bersama anak yang juga dengan kebutuhan khusus.<sup>98</sup> Artinya kelas seperti ini hanya akan menampung anak berkebutuhan khusus tanpa bercampur dengan anak reguler.

i. Model Kurikulum

Kurikulum adalah seluruh program dan kehidupan dalam sekolah, yakni segala pengalaman anak dibawah tanggung jawab sekolah, kurikulum tidak hanya meliputi bahan pelajaran tetapi meliputi seluruh kehidupan dalam kelas, jadi hubungan sosial guru dengan murid, murid dengan murid lainnya serta metode atau cara mengevaluasi juga disebut kurikulum.<sup>99</sup>

- a. Melaksanakan Kurikulum K13 yang diadaptasi atau dimodifikasi agar dapat mengakomodasi seluruh peserta didik, termasuk peserta didik berkebutuhan khusus:<sup>100</sup>
- b. Melaksanakan kurikulum berdasarkan prinsip kebaikan dan pengayaan dalam layanan pembelajaran, pendayagunaan kondisi alam, pendayagunaan kondisi sosial dan budaya, serta keragaman peserta didik.

101

---

<sup>97</sup> David Wijaya, *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2019), 27

<sup>98</sup> Stella Olivia, *Pendidikan Inklusi untuk Anak-Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), 7

<sup>99</sup> Loeloek Endah Poerwati, *Kurikulum 2013*, (Jakarta: PT Prestasi Pustaka, 2013), hlm. 3

<sup>100</sup> Rochmah, L. (2012). *ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SD NEGERI BEDALI 5 LAWANG KABUPATEN MALANG* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).

<sup>101</sup> David Wijaya, *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2019). 88

- c. Melaksanakan mata pelajaran program khusus untuk dapat mengembangkan keterampilan sosial dan nilai budaya serta menumbuhkan *soft skill* yang akan menciptakan *Life Skill* sesuai jenis kelainan anak berkebutuhan khusus.<sup>102</sup>
  - d. Melaksanakan program pengembangan diri berupa kegiatan ekstrakurikuler di dalam pembentukan karakter peserta didik yang baik yang diikuti peserta didik berkebutuhan khusus dan kegiatan layanan konseling dan terapeutik.
  - e. Mengembangkan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) bagi mata pelajaran program khusus.<sup>103</sup>
  - f. Mengembangkan KI dan KD bagi seluruh mata pelajaran untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak menggunakan kurikulum standar.
- j. Pendidik
- Pengelolaan sekolah inklusif di dalam pelaksanaannya perlu memiliki pendidik dan tenaga kependidikan berikut :<sup>104105</sup>
- a. Guru Pembimbing Khusus (GPK), yang berlatar belakang S1 PLB dan/atau guru yang telah mengikuti Diklat pendidikan Inklusif yang bertugas bukan sebagai guru kelas, guru pelajaran, dan guru BP, tetapi

---

<sup>102</sup> Negeri, T. S., & Kendal, M. K. (2012). Manajemen Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif: Kajian Aplikatif Pentingnya Menghargai Keberagaman Bagi Anak-anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, 1(2).

<sup>103</sup> Yuliasuti, P. R. (2019, September). Kompetensi Guru dalam menerapkan nilai-nilai pendidikan inklusif di Sekolah Inklusi Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Dasar. In *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Pendidikan* (Vol. 1, No. 1).

<sup>104</sup> Khotimah, H. (2019). ANALISIS KEBIJAKAN PERMENDIKNAS No. 70 TAHUN 2009 TENTANG SEKOLAH INKLUSI. *Realita: Jurnal Penelitian dan Kebudayaan Islam*, 17(2).

<sup>105</sup> David Wijaya, *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2019), 101

bertugas sebagai guru khusus terkait kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus.<sup>106</sup>

- b. Kepala sekolah, yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi tugas GPK.
- c. Guru kelas dan guru mata pelajaran, yang melaksanakan tugas pelayanan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus dalam proses pembelajaran dan penilaian dengan menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminatif.
- d. Guru pembina ekstrakurikuler, yang melaksanakan tugas pelayanan terhadap peserta didik berkebutuhan khusus dalam proses kegiatan ekstrakurikuler.

k. Proses Pembelajaran

Penyelenggara pendidikan inklusif perlu :<sup>107</sup>

- a. Melakukan adaptasi silabus dan RPP yang sesuai dengan karakteristik peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.<sup>108</sup>
- b. Menyusun Program Pembelajaran Individual (PPI) khusus untuk peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak menggunakan kurikulum standar.<sup>109</sup>
- c. Melaksanakan PPI di kelas bersama melaksanakan pembelajaran reguler yang berlangsung atau dilaksanakan di ruang khusus.
- d. Melaksanakan program khusus dan PPI oleh guru pembimbing khusus.
- e. Memantau pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.

---

<sup>106</sup> Isabella, P., Emosda, E., & Suratno, S. (2014). Evaluasi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Di SDN 131/IV Kota Jambi. *Jurnal Tekno-Pedagogi*, 4(2).

<sup>107</sup> Yayasan sayangi Tunas Cilik, *Pendidikan inklusif: Apa, Mengapa dan Bagaimana*, (Bandung: Inclusive Community Development and School for All, 2016), 44

<sup>108</sup> David Wijaya, *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2019). 99

<sup>109</sup> Mukarromah, I. (2016). PELAKSANAAN KURIKULUM ADAPTIF DI SEKOLAH PENYELENGGARA PENDIDIKAN INKLUSI DI SEKOLAH DASAR NEGERI GIWANGAN, YOGYAKARTA. *WIDIA ORTODIDAKTIKA*, 5(9), 908.

## 1. Evaluasi Pembelajaran

Penyelenggara pendidikan inklusif seharusnya perlu memiliki standar penilaian pendidikan dengan kriteria, sebagai berikut:<sup>110111112</sup>

- a. Guru dapat menginformasikan rancangan dan kriteria penilaian peserta didik berkebutuhan khusus kepada orangtua pada semester yang berjalan.
- b. Guru melakukan penilaian pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus tidak disertai gangguan intelektual menggunakan standar penilaian umum.
- c. Guru melakukan penilaian pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus disertai gangguan intelektual (IQ) di bawah rata-rata) menggunakan standar penilaian khusus atau sesuai dengan karakteristik peserta didik.
- d. Guru mengadaptasi prosedur atau media penilaian peserta didik berkebutuhan khusus.
- e. Sekolah menentukan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) bagi peserta didik berkebutuhan khusus sama dengan peserta didik lainnya pada seluruh mata pelajaran dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan peserta didik karakteristik mata pelajaran, serta kondisi sekolah.
- f. Sekolah mengukur ketercapaian KKM peserta didik berkebutuhan khusus yang menggunakan kurikulum di bawah standar berdasarkan kemajuan dari masing-masing peserta didik dan bukan berdasarkan rata-rata kelas.<sup>113</sup>

---

<sup>110</sup>Maftuhatin, L. (2014). Evaluasi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) di Kelas Inklusif di SD Plus Darul Ulum Jombang. *Religi: Jurnal Studi Islam*, 5(2), 201

<sup>111</sup> Stella Olivia, *Pendidikan Inklusi untuk Anak-Anak Berkebutuhan Khusus*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2017), 8

<sup>112</sup> David Wijaya, *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2019), 103

- g. Sekolah menentukan peserta didik berkebutuhan khusus yang menggunakan kurikulum dibawah standar tidak mengenal tinggal kelas.
- h. Sekolah melaporkan hasil penilaian setiap akhir semester kepada orangtua peserta didik dalam bentuk buku laporan hasil belajar peserta didik.
- i. Sekolah melaporkan hasil belajar peserta didik yang menggunakan kurikulum tidak standar atau di bawah standar dilengkapi dengan deskripsi atau narasi.
- j. Sekolah menyerahkan ijazah pada setiap peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus yang telah lulus, sedangkan peserta didik berkebutuhan khusus yang tidak mengikuti ujian nasional tidak perlu dinyatakan lulus dan diberikan Surat Tanda Tamat Belajar dari satuan pendidikan bersangkutan.
- k. Sekolah menyelenggarakan ujian sekolah seluruh mata pelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus yang menggunakan kurikulum di bawah standar.<sup>114</sup>
- l. Sekolah menentukan kelulusan peserta didik berkebutuhan khusus dengan menggunakan kurikulum standar sesuai kriteria kelulusan.
- m. Sekolah tidak mengikutsertakan peserta didik berkebutuhan khusus dengan menggunakan kurikulum di bawah standar dalam ujian nasional.

### 3. Pengendalian

- 1) Kontrol dan Pengawasan oleh Kepala Madrasah

---

<sup>113</sup> Widyawati, R. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Program Inklusi Sekolah Dasar. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(1), 109

<sup>114</sup> David Wijaya, *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2019).

Keberhasilan dalam penyelenggaraan pendidikan tidak lepas dari peran kepala sekolah.”<sup>115</sup> Dalam pelaksanaan pendidikan inklusi peran serta kepala sekolah dinilai sangatlah penting bagi keberhasilan sekolah inklusi. Ada dua bentuk upaya Kepala Sekolah dalam pelaksanaan sekolah inklusi yaitu Monitoring dan evaluasi adalah suatu kegiatan yang ditujukan pada suatu kegiatan atau program dalam hal ini penyelenggaraan pendidikan inklusif yang sedang atau sudah berlangsung.<sup>116117</sup>

a) Monitoring

Monitoring merupakan aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh kepala sekolah untuk melihat atau memantau jalannya penyelenggaraan pendidikan inklusif selama kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian tujuan, melihat faktor pendukung dan penghambat program penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolahnya.<sup>118</sup> Proses monitoring dilakukan sebelum dan selama pelaksanaan program pendidikan inklusi.

b) Evaluasi

Sedangkan evaluasi merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pendidikan inklusif dengan kriteria tertentu yang telah ditetapkan untuk pengambilan suatu keputusan.<sup>119</sup> Proses evaluasi dilakukan berkala dan telah dijadwalkan agar persoalan bisa dicari solusi sejak dini.

---

<sup>115</sup> ERVIANA, S. Upaya Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Guru Di Paud Inklusi Pelangiku Jombang. *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, (2017), 4.

<sup>116</sup> Sumarni, M. S. *Pengelolaan Pendidikan Inklusif di Madrasah*. *Edukasi*, 17(2), 294

<sup>117</sup> David Wijaya, *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2019), 106

<sup>118</sup> Yayasan sayangi Tunas Cilik, *Pendidikan inklusif: Apa, Mengapa dan Bagaimana*, (Bandung: Inclusive Community Development and School for All, 2016). 63

<sup>119</sup> Taufan, J., & Mazhud, F. (2016). Kebijakan-kebijakan Kepala Sekolah Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di Sekolah X Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 14(1).

## 2) Pengawasan dan Pembinaan oleh Pengawas Madrasah

Selain kepala sekolah, pengawas memiliki peran yang signifikan dan strategis dalam proses dan hasil pendidikan yang bermutu di sekolah. Dalam konteks ini peran pengawas sekolah meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan dan tindak lanjut pengawas yang harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan (PP 19 Tahun 2005, pasal 55).<sup>120</sup> Peran pengawas setidaknya sebagai teladan bagi sekolah dan sebagai rekan kerja yang serasi dengan pihak sekolah dalam memajukan sekolah binaan. Pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, seorang pengawas mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi jalannya semua program sekolah dan mengontrol jalannya pelaksanaan pendidikan inklusif dalam setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah.

## 3) Pengawasan oleh Penyelenggara Lembaga Pendidikan dan Masyarakat

Masyarakat selaku mitra sekolah penyelenggara pendidikan inklusif memiliki peran yang strategis dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif dan pembangunan pendidikan, baik sebagai pelaku, penyelenggara, pengelola, penyandang dana, pengawas maupun tenaga kependidikan.<sup>121</sup> Sekolah perlu melakukan suatu upaya untuk dapat menarik perhatian masyarakat (luar dan dalam) dan para *stakeholder* agar mau turut serta berpartisipasi dan bekerja sama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Sekolah penyelenggara pendidikan inklusif perlu melakukan kerjasama baik dengan baik internal maupun eksternal.<sup>122</sup> Kerjasama internal dilakukan

---

<sup>120</sup> Sumarni, M. S. Pengelolaan Pendidikan Inklusif di Madrasah. *Edukasi*, 17(2), 294

<sup>121</sup> David Wijaya, *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2019), 144

<sup>122</sup> NUR HASANAH, A. T. S. N. A. (2016). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PROGRAM PEMBELAJARAN PADA SEKOLAH INKLUSIF DALAM

dengan semua komponen-komponen yang ada di sekolah seperti kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, pengawas, dll. Sedangkan kerjasama dengan pihak luar dapat melibatkan pihak lain seperti SLB, Pusat sumber pendidikan inklusif, rumah sakit, klinik, pusat terapi atau pusat intervensi, Perguruan Tinggi, atau lembaga-lembaga lainnya yang memiliki program penyelenggaraan, pembinaan, dan pengembangan keilmuan yang sama.<sup>123</sup>

#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dalam pembahasan ini merupakan penelitian yang telah dilakukan lebih dulu oleh peneliti lain dan memiliki pokok fokus penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini. Diantaranya adalah:

Pertama, Mayasari dengan penelitian yang berjudul Implementasi Kurikulum 2013 pada anak berkebutuhan khusus (ABK): Studi Kasus SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta.<sup>124</sup> Adapun hasil penelitian menjelaskan tentang implementasi kurikulum 2013, Struktur kurikulum, Proses Pelaksanaan pembelajaran Evaluasi Kurikulum serta faktor penghambat dalam pelaksanaan. Adapun hasil temuan untuk struktur kurikulum terjadi penyederhanaan materi sesuai kemampuan siswa. Factor pendukung dan penghambat berupa tidak terjadi diskriminasi dalam sosialnya namun penghambat berupa belum tersedianya GPK (guru pembimbing khusus). Dalam proses pembelajaran, anak ABK di dampingi oleh anak yang memiliki daya *Fast learner*. Pada penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek pelaksanaan kurikulum sehingga untuk memberikan kontribusi yang ideal bagi para calon sekolah berbasis inklusi belum maksimal.

---

KONTEKS MANAJEMEN BERBASIS SEKOLAH (STUDI KASUS DI SMP NEGERI 4 SIDOARJO). *Inspirasi Manajemen Pendidikan*, 4(2).

<sup>123</sup> David Wijaya, *Manajemen Pendidikan Inklusif Sekolah Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2019),

109

<sup>124</sup> Mayasari, *Implementasi Kurikulum 2013 Pada Anak Berkebutuhan Khusus (ABK): Studi Kasus SD Muhammadiyah Sapen Yogyakarta*, INKLUSI Journal Of Disability Studies. Vol. 3, No. 1, Januari-Juni 2016, 1

Kedua, Hendro Sugiono Wibowo dengan penelitian yang berjudul Metode Evaluasi pembelajaran inklusif bagi peserta didik *difabel netra*.<sup>125</sup> Adapun hasil penelitian menjelaskan tentang modifikasi evaluasi pembelajaran saja dan dilengkapi dengan teori-teori yang mendukung. Dan sistem evaluasi juga khusus ABK yang difabel saja sehingga tidak menjelaskan tentang bagaimana proses pembelajaran sampai menuju pada proses evaluasi. Penelitian ini belum menjawab tantangan dalam penerapan Pendidikan Inklusi secara detail bahkan kepada kebutuhan sosial yang diperlukan pada pendidikan berbasis inklusi. Terbatasnya subyek penelitian pada ABK khusus Difabel menjadikan kurang begitu memberikan kontribusi bagi calon sekolah inklusi yang menerima anak ABK *non-difabel*.

Ketiga, Dien laylatul Zakia dengan penelitian yang berjudul Guru Pembimbing Khusus (GPK): Pilar Pendidikan Inklusi.<sup>126</sup> Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui optimalisasi peran dan tugas guru pembimbing khusus di sekolah Inklusi, menemukan dampak yang dialami sekolah inklusi apabila tidak terdapat guru khusus serta upaya dan penyelesaiannya. Adapun hasil temuan yaitu pelaksanaan pendidikan yang tidak kondusif dimana guru kelas tidak berjalan maksimal menjalankan perannya karena harus memenuhi kebutuhan belajar beraneka ragam kecerdasan, anak ABK tidak terpenuhi kebutuhan belajarnya dengan baik dan dianggap sebagai pengganggu, karena kurang tersedianya GPK (guru pembimbing khusus) maka dalam menerima peserta didik dibatasi pada ABK dengan gejala ringan saja sementara yang berat diarahkan ke sekolah SLB, sementara upaya penanganannya dengan mengangkat GPK honorer dan berkolaborasi dengan para SLB. Dalam penelitian ini belum menjawab banyak aspek

---

<sup>125</sup> Hendro Sugiyono Wibowo, *Metode Evaluasi Pembelajaran Inklusif Bagi Peserta Didik Difabel Netra*, Journal Inklusi: Vol. 2, No. 1, Januari-Juni 2015., 87

<sup>126</sup> Dieni Laylatul Zakia, *Guru Pembimbing Khusus (GPK): Pilar Pendidikan Inklusi*, Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Surakarta : Meretas Sukses Publikasi Ilmiah Bidang Pendidikan Jurnal Bereputasi UNS & ISPI Jawa Tengah. 21 November 2015, 110.

yang dibutuhkan oleh para calon sekolah Inklusi karena masih terpaku dengan aspek GPK saja.

Keempat, penelitian Martin Iryayo dkk yang berjudul *Educational Partners' Perception towards Inclusive Education*<sup>127</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk melihat persepsi, orangtua, siswa, guru dan staf terhadap pengelolaan dan penerapan pendidikan inklusif, memastikan apakah secara sosial anak ABK diterima dan mendapat hak belajar. Namun hasil dari penelitian ini kurang memberikan jawaban yang memuaskan tentang pelaksanaan sekolah inklusi yang dicita-citakan pemerintah dan UNESCO tentang *Education For All*. Di Dalam penelitian ini khusus memaparkan hasil penelitian terkait hubungan sosial para ABK dalam sekolah Inklusi. Meski belum bisa menjadi rujukan lengkap bagi calon sekolah inklusi, namun bisa menjadi bahan referensi dari perspektif membangun atmosfer pendidikan yang sehat bagi para ABK dalam sekolah Inklusi.

### **E. Paradigma Penelitian**

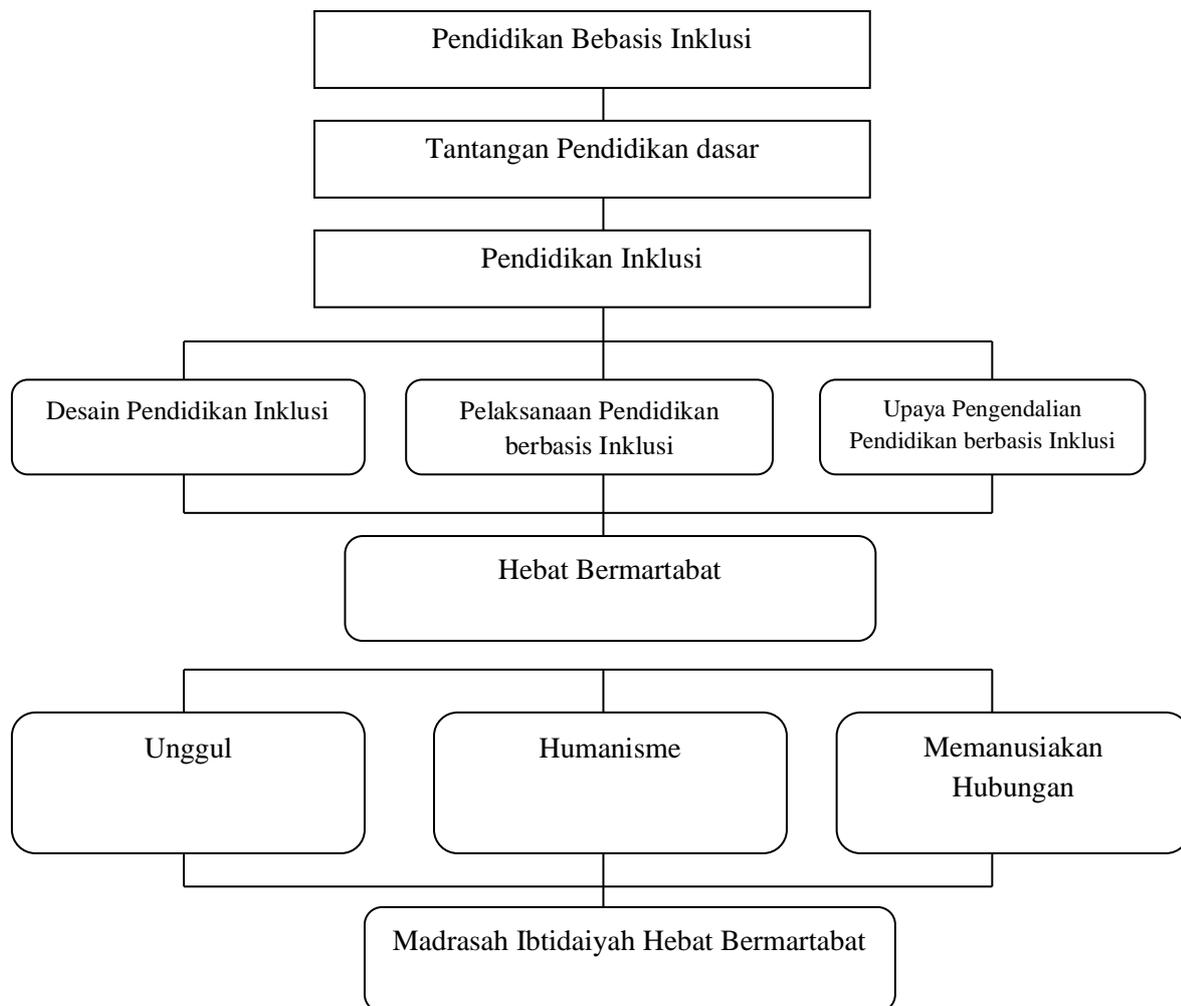
Penelitian kualitatif merupakan suatu model penelitian yang bersifat humanistik, dimana manusia dalam penelitian ini ditempatkan sebagai subjek utama dalam suatu peristiwa sosial.<sup>128</sup> Dalam hal ini hakikat manusia sebagai subyek memiliki kebebasan berpikir dan menentukan pilihan atas dasar budaya dan sistem yang diyakini oleh masing-masing individu. Peneliti meyakini bahwa dalam suatu sistem kemasyarakatan terdapat suatu ikatan yang menimbulkan keteraturan. Keteraturan ini terjadi secara alamiah, oleh karenanya tugas seorang peneliti sosial adalah mencari dan menemukan keteraturan itu. Berdasarkan hal tersebut penelitian kualitatif pada dasarnya adalah satu kegiatan sistematis untuk menemukan suatu teori dalam sebuah realita sosial bukan menguji teori atau hipotesis. Sehingga, secara epistemologis paradigma kualitatif

---

<sup>127</sup> Martin Iryayo dkk, *Education Partners' Perception Towards Inclusive Education*, INKLUSI: Journal of Disability Studies, Vol. V, No. 1 Januari-Juni 20018, 25

<sup>128</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2012), 22

senantiasa mengakui adanya fakta empiris di lapangan yang dijadikan sumber pengetahuan akan tetapi teori yang ada tidak dijadikan sebagai tolak ukur verifikasi.



Gambar 2: *Flowchart* Keterkaitan teori dalam Madrasah Ibtidaiyah Hebat Bermartabat

Peneliti mengangkat paradigma interpretif yang akan menemukan data deskriptif . Proses penelitian menjadi lebih penting daripada sekedar hasil.<sup>129</sup> Dalam penelitian kualitatif interpretif , proses menjadi hal yang amat harus diperhatikan, dimana peneliti sebagai pengumpul data lapangan harus mampu menempatkan dirinya pada posisi seobjektif mungkin sehingga data yang dikumpulkan menjadi data yang mampu untuk dipertanggungjawabkan.

<sup>129</sup> Muslim, *Varian-varian, Paradigma, Pendekatan, Metode dan Jenis Penelitian dalam Ilmu Komunikasi*, Jurnal: wahana, Vol. 1, No. 10. 2016. Hal. 1